
Implementasi Model Kirkpatrick Dalam Evaluasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kota Dalam Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan SanitasiNining Martiningtyas
STIKOM Surabaya**ABSTRAK**

Tenaga Fasilitator Kota merupakan tenaga ahli yang berperan penting dalam kegiatan fasilitasi pelaksanaan program sanitasi di Kabupaten/Kota. Pada umumnya, tenaga Fasilitator Kota yang direkrut merupakan fasilitator yang sudah mempunyai pengalaman di bidang sanitasi, sehingga pemahaman dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sanitasi dianggap sudah cukup layak dan memadai dalam memberikan fasilitasi dan konsultasi bagi Pokja Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, diperlukan pelatihan bagi Fasilitator Kota untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan), pemahaman, dan ketrampilan dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Guna untuk mengukur efektifitas dari program pelatihan, maka perlu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan. Metode evaluasi yang digunakan adalah Model 4 level evaluasi *Kirkpatrick*. Dengan demikian, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan model *Kirkpatrick* dalam evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang implementasi dari model *Kirkpatrick* dalam evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota untuk pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas bagi Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Sedangkan, subyek penelitian ini adalah Ketua Tim pelaksanaan kegiatan pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi, dengan menggunakan instrument berupa panduan wawancara dan panduan studi dokumentasi.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Model Evaluasi 4 (empat) level *Kirkpatrick* dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan program pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi guna untuk menentukan efektifitas dan ketepatangunaan pelatihan yang dilakukan. Hasil evaluasi dapat menggambarkan tingkat kepuasan peserta dalam mengikuti pelatihan, serta dapat memberikan gambaran perkembangan kinerja peserta setelah mengikuti pelatihan, sehingga dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang perlu untuk dilakukan guna pencapaian tujuan pelatihan bagi Fasilitator Kota dalam kegiatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi di Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kota, Model Evaluasi *Kirkpatrick*.

PENDAHULUAN

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat adalah tersedianya sanitasi yang baik dan layak bagi masyarakat di semua daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada kenyataannya, perhatian

terhadap sanitasi masih dianggap kurang memadai, sehingga pembangunan sektor sanitasi menjadi sektor yang tertinggal dibanding dengan pembangunan sektor lain di Indonesia. Oleh karena itu, pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Negara (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 Pemerintah menargetkan 100% akses sanitasi untuk Indonesia yang harus dicapai pada akhir tahun 2019. Portal Sanitasi Indonesia (2017) menyebutkan bahwa target 100% akses sanitasi untuk Indonesia dikenal dengan nama *Universal Access* Sanitasi untuk Indonesia (Wajidi, Ummah, & Sari, 2017).

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ BAPPENAS), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri. Program PPSP bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi melalui pendekatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sebelum pelaksanaan tahap implementasi. Dokumen perencanaan sanitasi ini disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan difasilitasi oleh Fasilitator Sanitasi Kabupaten dan Kota, yang disebut dengan Fasilitator Kota atau *City Facilitator* (CF).

Tenaga Fasilitator Kota merupakan tenaga ahli yang direkrut oleh Pemerintah dan berperan penting dalam kegiatan fasilitasi pelaksanaan program sanitasi di Kabupaten dan Kota. Pada umumnya, tenaga Fasilitator Kota yang direkrut merupakan fasilitator yang sudah mempunyai pengalaman di bidang sanitasi, serta mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan program pembangunan sanitasi (Alimudin, A., & Sukoco, 2017). Oleh karena itu, pemahaman tenaga Fasilitator Kota dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sanitasi dianggap sudah cukup layak dan memadai dalam memberikan fasilitasi dan konsultasi

bagi Pokja Kabupaten dan Kota dalam usaha mensukseskan program PPSP bagi Kabupaten dan Kota.

Meskipun demikian, untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan program PPSP diperlukan satu pemahaman yang baik tentang substansi, serta proses dan prosedur dalam menghasilkan dokumen perencanaan sanitasi yang berkualitas, komprehensif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga akan memudahkan pada tahap implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan bagi Fasilitator Kota Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan), pemahaman, dan ketrampilan dalam memberikan fasilitasi kepada Pokja Sanitasi Kabupaten dan Kota untuk penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Fasilitator Kota Kabupaten dan Kota ini bertujuan untuk memberikan pembekalan agar mereka mempunyai kapasitas dan kemampuan tentang substansi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi dan fasilitasi Pokja Sanitasi Kabupaten dan Kota.

Guna untuk mengukur efektifitas dari program pelatihan, maka perlu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan, baik terhadap proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Metode evaluasi yang digunakan adalah model 4 level evaluasi *Kirkpatrick*. Dengan demikian, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan model *Kirkpatrick* dalam evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi model *Kirkpatrick* dalam evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Manfaat dari hasil penelitian adalah diharapkan dapat

dijadikan masukan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas bagi Fasilitator Kota agar dapat dijadikan solusi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program pelatihan, sehingga langkah perbaikan dapat segera ditindaklanjuti. (Setiawan, Sukoco, Dhaniarti, & Hasyim, 2017)

TINJAUAN PUSTAKA

Model 4 Level Evaluasi Kirkpatrick

Pengertian pelatihan menurut Susilo Martoyo (2007) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, guna untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan terbatas. Mutiara S. Panggabean (2004) menjelaskan bahwa pelatihan lebih difokuskan pada pekerjaan saat ini untuk meningkatkan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan, Oemar Hamalik (2007) menjelaskan bahwa pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan, seperti memberikan pengarahan, bimbingan, fasilitasi atau pendampingan, penyampaian informasi, serta latihan ketrampilan, dimana pada dasarnya peserta telah memiliki kemampuan dan pengalaman, serta motivasi untuk melaksanakan kegiatan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Berdasar pada pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan profesionalitas dari karyawan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan dapat dikatakan efektif atau sukses, bila tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Untuk mengetahui efektif atau suksesnya pelatihan dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan

yang sudah dilakukan. Evaluasi kegiatan pelatihan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, baik terhadap proses pembelajaran maupun terhadap hasil pembelajaran. Salah satu model evaluasi yang paling banyak digunakan adalah Model Evaluasi 4 (empat) level *Kirkpatrick*.

Menurut Kirkpatrick, D. L dan Kirkpatrick J. D (2006), dalam Syafril Ramadhon, terdapat 3 alasan spesifik dalam melakukan evaluasi kegiatan pelatihan, yaitu: (1) Untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi, (2) Untuk menentukan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak, (3) Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara untuk meningkatkan program pelatihan di masa yang akan datang. Model evaluasi yang dikembangkan oleh *Kirkpatrick* dikenal dengan istilah Model Evaluasi 4 (empat) level *Kirkpatrick*, yaitu: (1) Evaluasi Level 1: *Reaction Evaluating*, (2) Evaluasi Level 2: *Learning Evaluating*, (3) Evaluasi Level 3: *Behavior Evaluating*, dan (4) Evaluasi level 4: *Result Evaluating*.

Evaluasi level 1 mengukur reaksi yang berupa kepuasan peserta pelatihan terhadap pelatihan yang diikuti. Reaksi yang muncul dapat berupa perasaan dan keinginan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan, narasumber, materi, media/metode pembelajaran, maupun fasilitas/sarana yang disediakan selama pelatihan. Pada umumnya, alat ukur untuk evaluasi level 1 adalah form evaluasi berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk mengetahui semua informasi yang relevan yang akan diberikan oleh peserta pelatihan. Form ini biasanya diberikan kepada peserta setelah proses pelatihan berakhir atau sebelum penutupan. Evaluasi level 2 mengukur sejauh mana proses

pembelajaran telah dilaksanakan dalam pelatihan. Beberapa cara penilaian level 2 ini adalah dengan mengukur penilaian kinerja, studi kasus, latihan-latihan, atau dengan mengadakan pre-test dan post-test guna untuk mengukur penguasaan peserta terhadap topic pembelajaran sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran. Evaluasi level 3 mengukur ada tidaknya perubahan perilaku peserta setelah selesai mengikuti pelatihan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan survey terhadap pimpinan peserta, dengan melalui surat, telepon, dan sebagainya untuk mengetahui apakah ada perubahan perilaku dari peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi level 4 mengukur hasil akhir yang terjadi setelah peserta mengikuti pelatihan, yaitu mengukur ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar, pengetahuan, dan ketrampilan peserta. Evaluasi hasil akhir dapat dilakukan dengan membandingkan target sebelum dan sesudah pelatihan apakah ada peningkatan atau tidak.

Fasilitator Kota Program PPSP

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Nasional merupakan suatu lembaga *ad hoc* lintas kementerian yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. POKJA AMPL Nasional bertugas melaksanakan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Salah satu tahapan yang utama dari program nasional ini adalah fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu menyusun suatu rencana strategis pembangunan sanitasi yang komprehensif, koordinatif, dan terintegrasi di daerahnya masing-masing.

Kabupaten/Kota yang mengikuti program nasional PPSP ini diarahkan

untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategi sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dapat menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan strategi sanitasi disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur-unsur OPD dan pihak *stakeholders* lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi di Kabupaten/Kota, maka dibutuhkan tenaga fasilitator Kabupaten/Kota yang disebut dengan istilah Fasilitator Kota atau City Fasilitator (CF). Tenaga Fasilitator Kota adalah seorang tenaga ahli yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Atau dengan kata lain, tenaga Fasilitator Kota dapat disebut sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota dengan cara memberikan pendampingan/fasilitasi, serta menggerakkan dan mengarahkan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang berkualitas dan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Output dari kegiatan fasilitasi bagi Fasilitator Kota adalah tersusunnya dokumen perencanaan sanitasi yang berkualitas dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan, terselenggaranya kegiatan penjaminan kualitas mandiri oleh Pokja Kabupaten/Kota terhadap dokumen perencanaan sanitasi, terselenggaranya kegiatan Pokja

Kabupaten/Kota dalam rangka pengawalan program PPSP, serta tersusun dan terkirimnya dokumen perencanaan sanitasi kepada Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Provinsi atau Program Implementasi Unit (PIU) Teknis di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Info Sanitasi, 2014).

Dokumen Perencanaan Sanitasi

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No.185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, dimana peraturan ini dilatarbelakangi bahwa air minum dan sanitasi merupakan urusan lintas sektor yang memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk menunjang pembangunan sanitasi. Definisi pembangunan sanitasi berdasar Perpres ini adalah suatu upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestic, serta pengelolaan drainase lingkungan terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Terdapat tiga dokumen yang terkait dengan peningkatan perencanaan pembangunan sanitasi, yaitu Roadmap Sanitasi Nasional, Roadmap Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (Leiwakabessy, 2015).

Dokumen perencanaan sanitasi ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka untuk mencapai target *Universal Access* Sanitasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kebijakan nasional terkait dengan sanitasi, yaitu 100% Akses Sanitasi untuk Indonesia seperti yang tertulis dalam laman Portal Sanitasi Indonesia (Portal Sanitasi Indonesia, 2017). Oleh karena itu, agar target *Universal Access* Sanitasi dapat tercapai, maka diperlukan

perencanaan yang baik dan berkualitas dalam hal persiapan implementasi pembangunan sanitasi. Dengan melalui program PPSP, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi berupa Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen SSK disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen lain yang terkait dengan sanitasi. Berdasar buku Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (2016), disebutkan bahwa dokumen SSK berisi tentang pemetaan kondisi sanitasi skala Kabupaten/Kota, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi, strategi pembangunan sanitasi, serta kebutuhan program kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota hingga 5 tahun ke depan (Pokja AMPL, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang implementasi dari model *Kirkpatrick* dalam evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota untuk pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh informasi tentang situasi pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pelatihan ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016 di Kantor Konsultan Pelaksana Jakarta. Menurut Sugiyono (2007), obyek penelitian adalah situasi yang ingin diketahui dan terjadi didalamnya, dimana peneliti dapat mengamati aktivitas semua orang yang ada di suatu tempat tertentu. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan evaluasi pelatihan

peningkatan kapasitas bagi Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi.

Subyek penelitian adalah sumber data dari mana data dan informasi diperoleh. Informasi yang diperoleh harus sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang tepat perlu untuk ditentukan sumber data yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan (Arikunto, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model *Kirkpatrick* diimplementasikan dalam evaluasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi, sehingga diperlukan subyek penelitian yang memungkinkan untuk diperoleh data yang tepat. Subyek penelitian ini adalah Ketua Tim pelaksanaan kegiatan yang dipilih secara sengaja atau tidak random dan didasarkan atas pertimbangan pada tujuan tertentu. Menurut Arikunto (2006), teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pengambilan sampel secara tidak random dengan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu disebut sebagai teknik *sampling purposive*.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Berdasar metode yang digunakan tersebut, maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan panduan studi dokumentasi.

HASIL

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi selalu dilakukan evaluasi, yang dilakukan selama penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kualitas

dan kinerja dari para Fasilitator Kota yang menjadi peserta pelatihan. Evaluasi pada penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan sebelum acara penutupan pelatihan, dimana kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, dilakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, yaitu dengan memberikan soal pre-tes pada awal pelatihan sebelum materi diberikan dan post-tes pada akhir pelatihan setelah semua materi diberikan.

Evaluasi setelah penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan cara menilai kualitas dan kinerja Fasilitator Kota dalam melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi di Kabupaten/Kota tempat mereka bertugas. Penilaian dilakukan oleh Satker PPLP Provinsi, PIU Teknis di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Fasilitator Provinsi (PF), serta Konsultan Pendamping (KP). Yang menjadi penilaian dalam evaluasi ini adalah nilai kinerja masing-masing Fasilitator Kota dalam melakukan pendampingan bagi Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang berkualitas dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Selain itu, yang menjadi penilaian setelah selesainya penyelenggaraan pelatihan adalah kualitas dari dokumen perencanaan sanitasi yang tersusun dan terkirim kepada Satker PPLP Provinsi dan PIU Teknis di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melalui aplikasi yang ada di www.nawasis.com

Evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi dilakukan dengan menerapkan Model Evaluasi 4 (empat)

level *Kirkpatrick*, yaitu: (1) Evaluasi Level 1: *Reaction Evaluating*, (2) Evaluasi Level 2: *Learning Evaluating*, (3) Evaluasi Level 3: *Behavior Evaluating*, dan (4) Evaluasi level 4: *Result Evaluating*.

Pada evaluasi level 1 digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap pelatihan yang diikuti. Evaluasi level 1 ini menggunakan instrument evaluasi berupa kuesioner yang dibagikan kepada semua peserta sebelum penutupan program pelatihan. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan sistematis tentang pelaksanaan pelatihan. Adapun yang menjadi bahan evaluasi adalah: (1) Peserta pelatihan, yaitu tentang pemahaman dan manfaat materi pelatihan terhadap tugas yang akan dilaksanakan; (2) Materi pelatihan, yaitu tentang kualitas isi materi, kualitas penyajian materi, dan kesesuaian materi pelatihan dengan yang diharapkan; (3) Narasumber, yaitu tentang pemahaman dan penguasaan, kejelasan dan sistematika, kemampuan memahami dan menjawab pertanyaan, penguasaan media pengajaran, interaksi dengan peserta, dan pengelolaan waktu; (4) Fasilitas Pelatihan, yaitu tentang tempat pelatihan, alat dan media pelatihan, konsumsi pelatihan, dan sikap panitia.

Evaluasi level 2 digunakan untuk mengukur pencapaian proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam pelatihan. Evaluasi level 2 dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara mengukur kinerja masing-masing peserta selama mengikuti pelatihan. Pengukuran didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) Aspek Pengetahuan, yang terdiri dari Nilai Tes Awal, Tes Akhir, Tes Harian, dan Tugas Kelompok. Tugas Kelompok, terdiri dari materi: Penentuan Jumlah Desa Target Area Studi EHRA, Studi Primer Non EHRA, Digram Sistem Sanitasi (DSS), Instrumen Profil Sanitasi, Zona dan Sistem Sanitasi, Tahapan Pengembangan Sanitasi, Analisis

SWOT, Kerangka Kerja Logis (KKL), Matrik Program dan Kegiatan, serta Penyusunan Indikasi Volume dan Biaya; (2) Aspek Ketrampilan, yang terdiri dari Nilai ketrampilan bertanya, Mendengarkan aktif, dan Presentasi; (3) Aspek Sikap, yang terdiri dari Nilai kerjasama dalam Tim, Komitmen dalam mengerjakan tugas, dan Kedisiplinan selama mengikuti kegiatan.

Evaluasi level 3 digunakan untuk mengukur ada tidaknya perubahan perilaku peserta setelah selesai mengikuti pelatihan. Evaluasi level 3 dalam pelatihan ini dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja Fasilitator Kota setelah selesai mengikuti pelatihan dan masih dalam masa kontrak kerja. Penilaian dilakukan oleh 2 kelompok penilai, yaitu (1) Kelompok 1, terdiri dari: PIU Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama dengan Konsultan Pendamping; dan (2) Kelompok 2, terdiri dari: Pokja Kabupaten/Kota, Satker PPLP Provinsi, dan Fasilitator Provinsi (PF). Terdapat 4 (empat) kriteria penilaian, yaitu: (1) Nilai A, jika mempunyai nilai kinerja lebih dari 89; (2) Nilai B, jika mempunyai nilai kinerja antara 80 – 89; (3) Nilai C, jika mempunyai nilai kinerja antara 70 – 79; dan (4) Nilai D, jika mempunyai nilai kinerja kurang dari 70. Aspek yang menjadi penilaian adalah: (1) Nilai pemetaan nawasis, yang terdiri dari: progress kegiatan total dan nilai *Quality Assurance* (QA) dokumen perencanaan sanitasi, (2) Nilai monitoring dan evaluasi (monev), yang terdiri dari: pemahaman/pengetahuan; kemampuan advokasi dan koordinasi; sikap dan interaksi dengan Pokja; kehadiran/keaktifan; serta kemampuan fasilitasi, (3) Pemenuhan RKTL (Rencana Kerja dan Tindak Lanjut).

Evaluasi level 4 difokuskan untuk mengukur hasil akhir masing-masing peserta, yaitu untuk menentukan apakah program pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitisasi sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pelatihan ini. Hasil evaluasi pada level 4 ini, menjadi pedoman bagi PIU Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab dalam menangani kurikulum pelatihan agar dapat segera dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kegiatan evaluasi level 4 ini sudah dilakukan oleh PIU Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu dengan berdasarkan hasil seluruh evaluasi level 1, level 2, dan level 3 perlu untuk dilakukan perbaikan isi materi pelatihan, maupun waktu dan metode pembelajarannya. Selain itu, dilakukan juga kegiatan penyamaan persepsi bagi calon-calon narasumber guna untuk menghindari perbedaan persepsi dari narasumber dalam kelas paralel. Hasil evaluasi dari sisi peserta, dilakukan pemetaan bagi peserta berdasar pada kinerjanya dengan cara membagi menjadi 3 kelompok, yaitu peserta dengan kriteria Baik, Cukup, dan Kurang. Hal ini dilakukan untuk membedakan metode pembelajaran yang diberikan oleh narasumber. Bagi kelas dengan peserta yang mempunyai kriteria Baik, maka materi pelatihan diberikan dengan metode pembelajaran yang difokuskan pada praktik/studi kasus. Sedangkan, untuk kelas dengan kriteria peserta Kurang, maka metode pembelajaran lebih difokuskan pada pemahaman secara teoritis dibanding dengan praktik/studi kasus.

KESIMPULAN

Berdasar pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Model Evaluasi 4 (empat) level *Kirkpatrick* dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar evaluasi bagi PIU Teknis di Direktorat Jenderal Cipta

Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pelaksanaan program pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitisasi untuk menentukan efektifitas dan ketepatangunaan pelatihan yang dilakukan. Model Evaluasi 4 (empat) level *Kirkpatrick* dikembangkan atas dasar kelengkapan, kesederhanaan, dan kemudahan dalam mengimplementasikannya. Keempat level evaluasi ini dilakukan secara sekuen dan terintegrasi, sehingga dapat menggambarkan keseluruhan hasil evaluasi, baik dari sisi peserta, narasumber, materi pelatihan, serta fasilitas pelatihan. Hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan tingkat kepuasan peserta dalam mengikuti pelatihan, tetapi juga diperoleh gambaran perkembangan kinerja peserta setelah mengikuti pelatihan. Sehingga, berdasar hasil akhir evaluasi pada level 4 dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang perlu untuk dilakukan guna pencapaian tujuan pelatihan bagi Fasilitator Kota dalam kegiatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitisasi di Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Hamalik.Oemar. 2007. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martoyo, Susilo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Panggabean, S. Mutiara. 2004. *Manajemen Sumber Daya*

- Pokja *Manusia*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- AMPL. 2016. *Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Internet
- Info Sanitasi. 2014. Peran dan Tugas Fasilitator Dalam Pendampingan Program PPSP 2014. Diunduh tanggal 22 Agustus 2017 dari <https://www.slideshare.net/info-sanitasi/teknis-fasilitasi-penyusunan-dokumen-dalam-program-ppsp>
- Leiwakabessy, Sicillia. 2015. Tiga Dokumen Rujukan Untuk Perencanaan Pembangunan Sanitasi. Diunduh tanggal 22 Agustus 2016 dari <http://www.usdp.or.id/>
- Portal Sanitasi Indonesia. 2017. *Portal Sanitasi Indonesia: Universal Access Sanitasi, 100% Akses Sanitasi Untuk Indonesia*. Diunduh tanggal 18 Agustus 2017 di <http://www.sanitasi.or.id/> .
- Ramadhon, Syafril. *Penerapan Model Empat Level Kirkpatrick dalam Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Pusdiklat Migas*. Forum Diklat Vol. 6 No. 1. Diunduh tanggal 21 Agustus 2017 dari <http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/>
- Jurnal
- Alimudin, A., & Sukoco, A. (2017). The Leadership Style Model That Builds Work Behavior Through Organizational Culture. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3(2).
- Setiawan, M. I., Sukoco, A., Dhaniarti, I., & Hasyim, C. (2017). The Development of the Central Business District (CBD) Based on Public-Private Partnership. *IJTI (International Journal Of Transportation And Infrastructure)*, 1(1), 9–14. Retrieved from <http://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijti/article/view/327>
- Wajdi, M. B. N., Ummah, Y. C., & Sari, D. E. (2017). UKM Development Business Loan. *IJEED (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development)*, 1(1), 99–109. Retrieved from <http://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijeed/article/view/350>